

**IMPLIKASI HUKUM PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS BERDASARKAN
PASAL 9 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH:

MELISHA YOLANDA
NIM: 2020123059

Pembimbing:

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.**
- 2. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

ABSTRAK

Implikasi Hukum Pemberhentian Sementara Notaris Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(Melisha Yolanda, 2020123059, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 99 halaman, tahun 2024)

Tesis ini mengkaji implikasi hukum dari pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris berperan penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik ini diakui memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti isinya dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Notaris diharapkan untuk memegang standar etika dan moral yang tinggi karena mereka adalah penjaga kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Namun, ada situasi di mana notaris dapat diberhentikan sementara, misalnya ketika mereka sedang menjalani proses hukum pidana. Pemberhentian sementara ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan akta dan protokol yang dikelola oleh notaris tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana proses pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap proses pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan dampak hukum dari pemberhentian sementara notaris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Pertanggungjawaban, yang membahas tentang tanggung jawab hukum notaris baik dalam perdata maupun pidana; Teori Kepastian Hukum, yang menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum untuk memberikan jaminan kepada masyarakat; dan Teori Kewenangan, yang mendiskusikan batasan dan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis yang didasarkan pada studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pemberhentian sementara notaris dilakukan jika terdapat temuan pelanggaran oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), dengan keputusan akhir di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses ini bertujuan menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik. Selama pemberhentian, notaris tidak dapat menjalankan tugasnya, sehingga akta yang dibuat selama periode ini bisa dianggap tidak sah. Untuk menjaga keabsahan dokumen, protokol notaris harus dikelola oleh notaris pengganti. Pemberhentian sementara ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama terkait keabsahan akta dan akses terhadap dokumen yang ada, yang dapat berakibat pada potensi kerugian bagi mereka yang memerlukan layanan notaris.

Kata Kunci: Pemberhentian Sementara Notaris, Implikasi Hukum

ABSTRACT

Legal Implications of Temporary Dismissal of a Notary Based on Article 9 Paragraph (1) Letter E of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary

(Melisha Yolanda, 2020123059, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 99 pages, year 2024)

This thesis examines the legal implications of the temporary suspension of notaries under Article 9 paragraph (1) letter e of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position. Notaries play a crucial role in the Indonesian legal system as public officials with the authority to create authentic deeds. These deeds are recognized as having perfect evidentiary strength, meaning their contents are considered true unless proven otherwise. Notaries are expected to uphold high ethical and moral standards as they are the guardians of legal certainty for the public. Therefore, every action taken by a notary must comply with legal regulations and professional codes of ethics. However, there are situations where notaries can be temporarily suspended, such as when they are undergoing criminal proceedings. This temporary suspension can lead to legal uncertainty, especially concerning the deeds and protocols managed by the suspended notary. The research questions addressed in this study are: 1. What is the process of temporarily suspending a notary under Article 9 paragraph (1) letter e of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position? 2. What are the legal implications of the temporary suspension of a notary under Article 9 paragraph (1) letter e of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position? This study aims to provide a deep understanding of the process and legal impact of the temporary suspension of notaries. The theories used in this research include the Theory of Responsibility, discussing the legal responsibility of notaries in both civil and criminal contexts; the Theory of Legal Certainty, emphasizing the importance of consistency in law application to provide assurance to the public; and the Theory of Authority, discussing the scope and limitations of the powers held by notaries in performing their duties. The research method employed is a normative juridical approach, with analysis based on literature review, legislation, and relevant cases. The findings show that the temporary suspension of a notary is implemented if violations are found by the Notary Supervisory Board (MPN), with the final decision made by the Minister of Law and Human Rights. This process aims to maintain the profession's integrity and protect public interests. During the suspension, the notary cannot perform their duties, potentially rendering deeds made during this period invalid. To ensure the validity of documents, the notary's protocols must be managed by a replacement notary. This temporary suspension can also create legal uncertainty for the public, particularly concerning the validity of deeds and access to existing documents, potentially leading to losses for those requiring notarial services.

Keywords: Temporary Suspension of Notaries, Legal Implications